

# KELUAR DARI JERAT PENDIDIKAN YANG TAK MEMANUSIAKAN: Otonomi Pendidikan dan Rendahnya Kualitas Pembelajaran di Indonesia

*by* Yohanes Mudayen

---

**Submission date:** 13-Apr-2018 03:59PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 946122515

**File name:** 7.\_2015\_Eka\_Priyatma\_Mudayen-Buku.pdf (569.17K)

**Word count:** 3531

**Character count:** 24314



Sanata Dharma University Press

# MANUSIA PEMBELAJAR DI DUNIA TARIK ULUR

*Tanggapan terhadap Pandangan M. Sastrapratedja  
tentang Pendidikan sebagai Humanisasi*



Prolog: Karlina Supelli | Epilog: M. Sastrapratedja  
Editor: In Nugroho Budisantoso

# MANUSIA PEMBELAJAR DI DUNIA TARIK ULUR

Tanggapan terhadap Pandangan M. Sastrapratedja  
tentang Pendidikan sebagai Humanisasi

Editor: In Nugroho Budisantoso



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS

# MANUSIA PEMBELAJAR DI DUNIA TARIK ULUR

Tanggapan terhadap Pandangan M. Sastrapratedja tentang  
Pendidikan sebagai Humanisasi

Editor: In Nugroho Budisantoso

© 2015

Cetakan Pertama

xxiv; 388 hlm.; 160 x 218 mm.

ISBN: 978-602-0830-23-0



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS  
Jl. Affandi, Gejayan (Mrican) Tromol Pos 29  
Yogyakarta 55002; e-mail: [publisher@usd.ac.id](mailto:publisher@usd.ac.id)



ISBN 978-602-0830-23-0



Desain Sampul dan Tata Letak: Antonius Febri Harsanto

Ilustrasi Sampul:

"Semangat Muda" karya Kelompok PL Art. Pemenang I Lomba dan Festival Mural  
dengan tema "Pendidikan Transformatif" dalam rangka Dies Natalis ke-60 Universitas  
Sanata Dharma Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun  
termasuk fotokopi tanpa izin tertulis dari penerbit.



## Bab 19

### KELUAR DARI JERAT PENDIDIKAN YANG TAK MEMANUSIAKAN: Otonomi Pendidikan dan Rendahnya Kualitas Pembelajaran di Indonesia

**J. Eka Priyatma**

10

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi

**Y.M.V. Mudayen**

Program Studi Pendidikan Ekonomi Kekhususan Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

---

**Intisari:** Priyatma dan Mudayen dalam tulisan ini menanggapi tinjauan kualitatif Sastrapratedja atas realitas pendidikan di Indonesia yang secara umum kualitasnya masih sangat memprihatinkan dan bahkan mengalami kemunduran. Keduanya berpendapat bahwa kompleksitas masalah pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini membutuhkan pemikiran kritis dan solusi konkrit, misalnya dengan mewujudkan desentralisasi dan otonomi kampus. Selain itu, juga perlu diperhatikan aspek “humanistik” pada proses pembelajaran dalam pendidikan sebagai penyeimbangan untuk pendidikan yang cenderung sudah menjadi suatu “komoditi” dan “industri”, yang dalam konteks Universitas Sanata Dharma (USD) diinisiasi dalam praktik-praktik pembelajaran yang mengupayakan keutuhan pengolahan aspek-aspek competence, consience dan compassion.

## 1. Gelagat Mundurnya Kualitas Pendidikan di Indonesia

Sastrapratedja dalam “Butir-butir Pemikiran tentang Pendidikan”, menyampaikan beberapa gagasan terkait dengan realitas pendidikan di Indonesia yang secara umum kualitasnya masih sangat memprihatinkan dan bahkan mengalami kemunduran (Sastrapratedja, 2013: 289-303). Sastrapratedja menyampaikan gagasan tersebut berdasar evaluasi umum dan bersifat kualitatif. Oleh karena itu, tanggapan dalam artikel ini pun akan bersifat demikian.

Sastrapratedja menyinggung beberapa isu. Pertama, kurang jelasnya peran dan posisi pendidikan bagi pembangunan Indonesia padahal di semua negara maju, kualitas pendidikan berkorelasi positif dengan kemajuan bangsa. Meskipun ada <sup>9</sup> Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 tetapi Undang-undang tersebut tidak mempunyai landasan filosofis yang kuat. Kedua, pendidikan sangat terkait dengan banyak aspek lain yang tidak mungkin diselesaikan oleh pendidikan itu sendiri seperti kemampuan ekonomi masyarakat, keputusan politis pemerintah serta pengaruh arus globalisasi. Sementara itu, bukan hanya menyangkut perkara integrasi bangsa saja tetapi hampir semua persoalan bangsa dipahami seolah dapat diselesaikan oleh pendidikan seperti masalah korupsi, manipulasi hukum serta rendahnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Sastrapratedja menanggapi hubungan antara mutu dan biaya pendidikan serta bagaimana sebaiknya menyikapi derasnya arus globalisasi pendidikan. Pada pokoknya, Sastrapratedja berharap pemerintah mengambil tanggung jawab yang besar dalam pendanaan pendidikan karena bila tidak demikian maka pendidikan yang bermutu hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang

yang punya dukungan keuangan kuat. Sedang terhadap arus globalisasi, pendidikan Indonesia harus siap dengan terus terbuka terhadap standard mutu global di satu sisi tetapi di sisi lain harus menemukan keunggulan lokalnya.

Aspek lain yang juga menjadi perhatian serius dari Sastraprateja adalah kecenderungan pendidikan saat ini sebagai suatu “komoditas” dan “industri” (Sastrapratedja, 2013: 296). Aspek “komoditas” dan “industrial” memang hampir tidak terhindarkan dalam dunia pendidikan. Masalahnya, adalah bagaimana menjadikan pendidikan tidak sepenuhnya menjadi “komoditas”. Aspek “humanistik” dari pendidikan juga harus diperhatikan. Dunia pendidikan berada dalam tarikan dua kutub, yaitu “pasar” dan “tradisi humanistik”. Yang harus dilakukan adalah mengupayakan keseimbangan keduanya.

Humanisme dalam pendidikan itu perlu mendapatkan tempat dan porsi yang memadai dalam proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya di jenjang perguruan tinggi agar para mahasiswa mampu membangun empati dan simpati serta hasrat bela rasa terhadap orang lain. Pendidikan perlu didesain sebagai proses memanusiakan manusia agar para mahasiswa menjadi manusia yang seutuhnya dan berkembang secara optimal dalam tiga aspek yaitu *competence*, *conscience* dan *compassion* atau dikenal dengan sebutan 3C. Sastrapratedja (2013: 294) secara singkat mengungkapkan 3C dalam rumusan berikut. Pertama, pendidikan harus berfokus pada pencapaian kompetensi tertentu (*competence*). Kedua, pendidikan harus pula menumbuhkan hati nurani (*conscience*). Ketiga, pendidikan harus mampu menggugah rasa empati, solider dan hasrat bela rasa terhadap sesamanya, lebih-



lebih yang menderita (*compassion*). Aspek humanisme menjadi salah satu *concern* dari Universitas Sanata Dharma (USD) dan tercantum dalam visi USD sebagaimana tertuang dalam Renstra USD 2013-2017 hlm. 12, yaitu: “Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat”.

Artikel ini hendak menelaah tentang berbagai masalah krusial dalam dunia pendidikan dan sikap kritis yang perlu ditunjukkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Selain itu, tulisan ini juga hendak menggali posisi humanisme pendidikan dalam problematika yang terjadi dan meninjau implementasi humanism pendidikan dalam proses pembelajaran di USD.

## **2. Sikap Kritis terhadap Berbagai Masalah Krusial Pendidikan**

Secara umum ada dua sikap yang dapat kita ambil ketika memahami dan mengusulkan solusi terhadap masalah rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Sikap yang pertama lebih memakai pendekatan berbasis sumber daya dan, untuk itu, solusi yang ditawarkan sering harus berasal dari luar dunia pendidikan itu sendiri. Sikap kedua merupakan alternatifnya, yakni memakai pendekatan jejaring relasi aktor di dalam ekosistem pendidikan dan sebagai konsekuensinya. Solusi yang ditawarkan dapat berasal dari dunia pendidikan itu sendiri. Hal ini bersumber dari Teori Jejaring Aktor (Callon, 1986; Law, 1992).

Sastrapratedja, menurut pandangan kami, memilih pendekatan pertama, dengan menekankan pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Hal ini sangat mudah kita pahami oleh karena



ketidakberdayaan pemerintah di dalam mengelola sistem pendidikan nasional yang bermuara kepada tidak jelasnya peran dan posisinya dalam pembangunan, serta lemahnya identitas dan orientasinya. Perkara ini paling kentara dalam pergulatan kita menyikapi Undang-undang Sisdiknas yang secara filosofis lemah dan memuat kepentingan sempit kelompok yang sebenarnya berlawanan dengan realitas dan agenda besar bangsa, yakni merawat keberagaman dan memperkokoh integrasi bangsa.

Mengandalkan kemampuan pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan sebenarnya seperti menunggu Godot dalam drama karangan Samuel Beckett (1954) yang terkenal itu. Pemerintah sudah berganti berkali-kali berganti, tetapi pendidikan Indonesia tetap tidak beranjak kualitasnya. Sumber utama kelemahan pemerintah bukan terletak kepada kapasitasnya menyediakan dana, tetapi

***... feodalistik karena menempatkan warga negara lebih sebagai pihak yang diatur ketimbang pihak yang dilayani serta terus membuat dikotomi sikap dan perlakuan yang berbeda antara lembaga pendidikan negeri dan swasta.***

lebih terletak kepada lemahnya birokrasi dan sistem administrasi pendidikan yang sampai saat ini masih bersifat feodalistik, formalistik, dan sering tidak bebas dari kepentingan (politik). Ia feodalistik karena menempatkan warga negara lebih sebagai pihak yang diatur ketimbang pihak yang dilayani serta terus membuat dikotomi sikap dan

perlakuan yang berbeda antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Pendidikan swasta kurang ditempatkan sebagai mitra yang menutup ketidakberdayaan pemerintah tetapi malah sering dicurigai sebagai entitas bisnis yang mengeruk keuntungan dari kegiatan mulianya. Padahal, siapa pun tahu bahwa keuntungan (seandainya mungkin) dari aktivitas pendidikan tidak sebanding dengan kegiatan bisnis non-pendidikan.

Administrasi pendidikan yang dilakukan pemerintah juga masih sangat bersifat formalistik. Administrasi yang sejatinya demi peningkatan kualitas layanan justru jatuh menjadi senjata (alat) untuk menguatkan posisi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Lamban serta rumitnya birokrasi pemerintah dalam mengurus administrasi pendidikan justru mengantar semua entitas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi, menjadi lebih bersifat birokratis formalistis dan menjauhkannya dari nilai-nilai keutamaan pendidikan seperti kejujuran, keterbukaan, dan objektivitas. Tidak mengherankan apabila banyak inisiatif perbaikan kualitas pendidikan seperti dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah), sertifikasi guru dan dosen, hibah kompetitif, serta akreditasi tidak menaikkan mutu pendidikan secara signifikan. Hal ini karena semua inisiatif baik tersebut pada akhirnya bermuara pada realitas formalisme administratif, sementara yang pokok, yakni tujuan dan prosesnya, menjadi nomor dua. Realitas ini sangat memprihatinkan karena perlahan tapi pasti telah menggiring semua pihak di dunia pendidikan untuk menjadi munafik, legalistik, dan formalistik.

Dunia pendidikan semakin hari semakin jauh dari pergulatan ilmiah

yang memelihara iklim obyektivitas, sikap kritis, dan kejujuran. Maka yang kita rasakan adalah sebuah kemandekan dan frustrasi. Semangat dan gairah belajar menjadi mati karena dunia pendidikan tidak jauh berbeda dari dunia pada umumnya yang diwarnai oleh pragmatisme, jalan pintas, dan bergaya hedonistik. Hal ini sudah lama diperingatkan oleh oleh Rektor Universitas Indonesia kedua (1951-1954) yakni Prof. R. Soepomo (Irianto, 2012). Khusus untuk Pendidikan Tinggi, <sup>3</sup> beliau mengingatkan bahwa perguruan tinggi tidak boleh ditempatkan sebagai sebuah jawatan belaka di bawah administrasi Kementerian Pendidikan. Bila demikian maka perguruan tinggi akan menyerahkan dirinya kepada formalisme birokrasi dan sebagai akibatnya akan membinasakan semangat akademik dan perkembangan kehidupannya.

Administrasi pendidikan yang sering tidak bebas dari kepentingan (politik) telah merusak transparansi dan keadilan. Karena situasi ini, banyak hal terkait dengan pengembangan pendidikan sering harus melewati proses yang rumit, berliku, misterius, serta tidak pasti. Akhirnya, lembaga pendidikan sering terpaksa bertingkah seperti agen rahasia dan bermain di belakang pintu dengan banyak pihak secara informal hampir untuk segala hal mulai dari pembukaan program studi, pengurusan pangkat akademik, pelamaran beasiswa, dan akreditasi.

Realitas pengelolaan pendidikan yang formalistik birokratis ini telah menyeret proses pembelajaran dan pengembangan ilmu bersifat formalistik juga. Inilah yang menjadi sebab mengapa pembelajaran yang mestinya menantang dan menggairahkan menjadi kering karena telah tereduksi menjadi sekedar ritual formal di kelas dengan tujuan nilai formal yang ditentukan lewat ujian tulis. Dinamika penelitian



pun akhirnya disibukkan dengan pembuatan laporan keuangan dan proses diseminasi pengetahuan, yang juga bersifat formalistik basa-basi karena yang terpenting adalah sertifikat.

Oleh karena itu, sebenarnya yang telah rusak dalam dunia pendidikan kita adalah relasi antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Masalah ini tidak akan selesai bahkan ketika kita telah mengambil keputusan politik untuk mengalokasikan dana APBN minimal 20% bagi pendidikan. Selama dunia pendidikan masih sangat terpengaruh oleh ketidakberdayaan pemerintah melakukan administrasi pendidikan yang bermutu maka selama itu pula secara umum kualitas pendidikan kita tidak akan beranjak maju. Apalagi akhirnya kita sadar bahwa dana 20% dari APBN itu, 80% di antaranya kita belanjakan untuk gaji.

Sementara itu, tanpa melupakan persoalan lemahnya administrasi pendidikan, modal dasar pendidikan kita, yakni para guru dan dosen, masih jauh dari kualifikasi minimalnya. Baru pada akhir 2015 ini pemerintah berani menetapkan bahwa guru sekolah dasar minimal berijazah S1 dan dosen program studi S1 minimal berijazah S2. Itu pun masih ada 500 ribu guru belum tersertifikasi dan masih ada tiga ribuan dosen belum berijazah S2. Dengan kata lain, sebenarnya memang kondisi pendidikan kita masih dalam taraf darurat alias apa adanya.

***... sebenarnya yang telah rusak dalam dunia pendidikan kita adalah relasi antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.***



### 3. Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan sebagai Solusi

Menghadapi masalah berat nan rumit<sup>8</sup> ini, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah<sup>7</sup> memecahnya menjadi beberapa komponen yang *manageable*. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi. Ketidakberdayaan pemerintah melakukan adminisitrasi pendidikan hanya dapat diatasi dengan desentralisasi dan otonomi mengingat besarnya kompleksitas dan cakupan dunia pendidikan yang membentang di tiga zona waktu berbeda dari Sabang sampai Merauke.

Desentralisasi akan mendorong terwujudnya sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang tidak terpusat dan rumit, tetapi menjadi sederhana dan kontekstual. Dalam pengembangan kurikulum, pemerintah harus berani melakukan desentralisasi di mana hanya mata ajar pokok yang ditetapkan capaian hasil minimalnya. Isi, strategi pembelajaran, serta model evaluasi untuk bidang studi lain biarlah dirumuskan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan konteks dan kekhasannya. Pemerintah pusat cukup mendukung dan memberikan fasilitas sesuai dengan permintaan.

Perguruan tinggi sebaiknya diberi otonomi yang longgar supaya dapat bergerak lincah di tengah perubahan zaman yang pesat ini. Pemerintah cukup menetapkan rambu-rambu manajemen keuangan PTN supaya uang rakyat dapat digunakan secara bertanggung-jawab. Harus ada rumusan posisi yang jelas antara PTN dan PTS, misalnya universitas negeri lebih diarahkan untuk pendidikan setingkat Master dan Doktor. Tidak seperti saat ini, masih banyak universitas negeri yang tetap

menyelenggarakan pendidikan setingkat Diploma.

Otonomi juga sebaiknya diberikan baik dalam pengembangan kurikulum maupun pembukaan program studi. Memang ada ketakutan dari pemerintah bahwa otonomi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, seperti penjualan ijazah dan gelar palsu. Namun, daripada demi mengatasi masalah anomali kecil seperti itu dengan kebijakan terpusat yang justru menghambat lembaga pendidikan untuk maju secara dinamis, akan lebih baik bila otonomi digulirkan dan risikonya diminimalisir.

Dalam kerangka otonomi dan desentralisasi pendidikan tersebut, para aktor/pihak penting pendidikan, yakni guru, siswa dan mahasiswa, sekolah dan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga usaha/bisnis, dan orang tua, merumuskan kembali peran dan fungsi masing-masing. Perumusan tersebut sebaiknya berangkat dari kesadaran bahwa kualitas pendidikan terutama dipengaruhi oleh kualitas relasi di antara mereka dan bukan terutama terletak kepada kekuatan salah satu pihak saja. Bila otonomi dan desentralisasi dapat diwujudkan maka relasi para pemangku kepentingan dapat terkelola lebih baik karena semua pihak berada dalam jangkauan. Dengan demikian, sistem administrasi pendidikan pun menjadi lebih jelas, sederhana, dan tidak membentang dan terpusat. Akhirnya, dengan pendekatan otonomi ini, komitmen semua pihak yang berkepentingan lebih mudah ditagih karena cakupannya yang tidak terlalu luas. Hal ini akan menjadikan dunia pendidikan lebih kontekstual, aktual, dan menghargai keberagaman yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Hal ini memang berbeda dengan pendekatan selama ini yang cenderung seragam dan terpusat.

#### 4. Menjalankan Humanisme Pendidikan demi Sambungnya Pembelajaran dengan Konteks Kemanusiaan

Dari ranah kebijakan kita beralih ke ranah tindakan pembelajaran. Sembari terus mengusahakan agar cuaca yang menaungi kebijakan pendidikan di Indonesia semakin ramah pada cita-cita paling fundamental dari pendidikan, tanggapan kritis di lapangan dalam bentuk proses pembelajaran yang dipilih secara sadar di tengah problematika yang terjadi harus diusahakan dan tidak perlu ditunda sampai datangnya perubahan kebijakan. Tentu saja hal ini merupakan inisiatif dan, sebagai inisiatif, terbuka pada kritik dan gagasan-gagasan pembenahan.

Inisiatif tindakan pembelajaran yang dimaksud adalah tindakan pembelajaran yang bersumber dan berlandaskan pada humanisme pendidikan. Humanisme dalam arti filsafat diartikan sebagai paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga manusia menempati posisi yang sentral dan penting dalam hidup sehari-hari (Abidin, 2006). Pendidikan yang humanis berfokus pada cara menjalin komunikasi dan relasi personal antarpribadi dengan pribadi dan antarpribadi dengan kelompok di dalam komunitas pendidikan. Pendidikan yang efektif turut ditentukan oleh kemampuan pendidik menghadirkan diri sepenuhnya dalam proses pembelajaran sehingga relasinya dengan peserta didik menjadi lebih bermakna. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan pendidik untuk menyadari konteks besar pendidikan yang belum beranjak dari tarik ulur kepentingan, dan menghadirkan kesadaran itu secara bijak



di arena pembelajaran sehingga peserta didik justru semakin mendapatkan energi untuk belajar menjadi manusia kritis dan bermartabat di tengah tegangan-tegangan yang berlangsung pada kehidupan aktualnya.

<sup>2</sup> Humanisme harus dipahami sebagai suatu keyakinan etis yang <sup>2</sup> secara langsung mengandung

sikap etis praktis yang sesuai, yaitu suatu keyakinan bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia dalam arti yang sepenuhnya (Budiningsih, 2010: 4). Humanisme juga diartikan sebagai solidaritas terhadap orang lain, tanpa memandang sekat-sekat primordial dan sosialnya. <sup>2</sup> Ini berarti humanisme tidak terikat pada batas-batas ideologi, agama, dan legitimasi teoritis lain (Magnis-Suseno, 2001). Maka, teori humanisme pendidikan memungkinkan konsep belajar disusun dengan <sup>1</sup> menitikberatkan pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang dimiliki, serta mengembangkan kemampuan tersebut. Karenanya, pembelajaran dengan asas humanisme pendidikan membuka ruang akan proses dilatih dan terolahnya kemampuan seseorang untuk – dalam kebebasan yang dimiliki sebagai manusia otonom – menyadari konteks hidupnya, memahami posisi dirinya, dan belajar menjawab tuntutan etis yang hadir di depan matanya sebagai perwujudan perkembangan

***Pendidikan yang efektif  
turut ditentukan oleh ...  
kemampuan pendidik  
untuk menyadari konteks  
besar pendidikan yang  
belum beranjak dari tarik  
ulur kepentingan, dan  
menghadirkan kesadaran  
itu secara bijak di arena  
pembelajaran ...***



intelektual yang tanggap realitas. Dengan itu semua, relevansi dan kebermaknaan proses belajar ditemukan secara otentik dan dirasakan denyut-denyutnya.

<sup>1</sup> Teori humanisme pendidikan banyak mengadopsi prinsip-prinsip progresif dan mendapat stimulan dari eksistensialisme, yang mencakup keberpusatan pada anak, peran guru yang tidak otoritatif, pemfokusan pada subjek didik yang terlibat aktif, dan sisi-sisi pendidikan yang kooperatif dan demokratis. Pada intinya fokus teori humanisme pendidikan adalah perilaku seseorang. Selain itu, teori belajar humanistik sifatnya mementingkan isi pembelajaran yang sambung dengan gagasan memanusiakan manusia serta tahapannya yang fleksibel terhadap keadaan pembelajar daripada terpaku pada isi dan langkah-langkah baku yang alergi perubahan dan situasi.

## **5. Implementasi Humanisme Pendidikan dalam Praktik Pembelajaran di USD**

<sup>1</sup> Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan menuntut keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. <sup>1</sup> Dalam proses pembelajaran di USD, implementasi dari teori humanisme pendidikan tampak jelas dalam penerapan Paradigma Pedagogi Ignasian, yang tercermin dalam lima langkah yaitu (P3MP-USD, 2008): 1) konteks, 2) pengalaman, 3) refleksi, 4) tindakan, 5) evaluasi.

*Pertama*, konteks. Proses pembelajaran dalam perkuliahan perlu

dilaksanakan dengan berangkat dari: (1) konteks kehidupan nyata para mahasiswa, (2) lingkungan kampus dan kelas, (3) dosen dengan wawasan yang memadai dan kritis, serta (4) semangat *cura personalis*. Proses perkuliahan berangkat dari konteks nyata para mahasiswa “bersentuhan” dan sambung dengan realitas di masyarakat. Selanjutnya, konteks nyata para mahasiswa tersebut dibawa ke lingkungan kampus dan kelas sebagai bahan diskusi dan *case study* yang perlu dicari solusinya secara bersama-sama. Pembelajaran dikemas dalam semangat *cura personalis*, artinya dosen melakukan pendekatan secara personal kepada tiap-tiap mahasiswa sehingga mahasiswa menemukan dirinya dihargai, merasakan kebebasan, dan bisa mengembangkan talenta yang dimilikinya secara optimal.

*Kedua*, pengalaman. Proses pembelajaran memberikan kesempatan seluas mungkin kepada para mahasiswa peserta kuliah untuk berkontak secara pribadi dengan kenyataan hidup atau “memasuki” kenyataan hidup. Misalnya: dalam perkuliahan, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan *service learning* dan menempuh kuliah lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha/bisnis. Dalam konteks itu, mahasiswa juga berkesempatan membantu para pemilik usaha untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya. Atau, bisa juga, mahasiswa dipertemukan dengan realitas kemiskinan dan ketidakadilan yang hidup di sekitar ruang gerak mereka, dan dalam pendampingan dosen menyelami pengalaman tersebut.

*Ketiga*, refleksi. Proses pembelajaran perlu dirancang dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat atau kondisi kemiskinan dan

ketidakadilan yang dikenali. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menggali makna dari realitas kehidupan masyarakat dan dari usaha-usaha belajar yang dialaminya sendiri. Proses pembelajaran semacam ini memberi kesempatan mahasiswa untuk menemukan nilai-nilai yang tersembunyi di balik setiap pengalaman hidup mereka, baik saat bersentuhan dengan realitas masyarakat maupun saat menekuni bahan-bahan pelajaran yang seringkali berisi rentetan informasi dan abstraksi-abstraksi.

*Keempat*, tindakan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pilihan tindakan yang sesuai dengan hati nuraninya, dan belajar mewujudkannya. Mahasiswa diharapkan dapat memilih tindakan yang menunjukkan sikap dan keberpihakan yang bertolak dari prinsip-prinsip dasar moralitas dan keadaban yang terhubung dengan martabat kemanusiaan mereka. Dengan demikian, dalam rupa-rupa kompleksitas situasi yang mungkin terjadi dan mempengaruhi kejernihan pandangan, mereka mampu melihat dengan sadar dimungkinkannya pembelaan kaum miskin, lemah, dan tersingkir dalam percaturan kehidupan sekaligus juga kelihatan tantangan-tantangan yang harus dilalui beserta kerja keras yang tertuntut pada mereka.

*Kelima*, evaluasi. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan diagnosis dan evaluasi diri berkenaan dengan peristiwa pembelajaran sambung realitas yang sudah mereka terjun untuk memperoleh *feedback* yang otentik dan bermakna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemaknaan mereka sendiri mengenai kontribusi pendidikan tinggi, di mana mereka berada dan berproses dalam belajar, terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi



dasar bagi mahasiswa, dalam bimbingan pendamping-pendamping belajarnya, untuk menyusun rencana perbaikan proses belajar selanjutnya dan tindakan konkrit yang lebih tepat sasaran, relevan, dan bermakna sesuai dengan visi pendidikan sebagai humanisasi.

Implementasi teori humanisme pendidikan dalam proses pembelajaran di USD juga tampak dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan model-model pembelajaran kreatif dan inovatif, misalnya pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, sosio drama, penggunaan video dan multimedia, pembelajaran *project based learning*, dan lain-lain (Lie, 2005). Singkatnya, teori humanisme pendidikan tampak dan menjadi nyata dalam proses pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya keseimbangan pencapaian 3C, yaitu *competence*, *conscience*, dan *compassion*.

#### **6. Demi Manusia Pembelajar yang Berkembang Kemanusiaannya**

Kompleksitas masalah pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini membutuhkan pemikiran kritis dan solusi konkrit. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi kampus. Perguruan tinggi sebaiknya diberi otonomi yang longgar supaya dapat bergerak lincah di tengah perubahan zaman yang pesat ini. Pemerintah cukup menetapkan rambu-rambu manajemen keuangan PTN supaya uang rakyat dapat digunakan secara bertanggung-jawab. Harus ada rumusan posisi yang jelas antara PTN dan PTS. Otonomi juga sebaiknya diberikan baik dalam pengembangan kurikulum maupun pembukaan



program studi. Semuanya ini ditempuh demi semakin ditemukan dan terbukanya jalan agar berbagai kebijakan yang menyangkut pendidikan lebih melayani, daripada menguasai, masyarakat sehingga pada gilirannya memungkinkan munculnya peran serta yang lebih besar dari masyarakat dalam membangun pendidikan yang melahirkan manusia-manusia bermartabat serta menjadikan dunia pendidikan lebih kontekstual, aktual, dan menghargai keberagaman yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, selagi tarik-menarik barangkali masih menyertai dalam perubahan kebijakan, mendesak diperhatikan dan perlu ditempuh proses pembelajaran berlandaskan nilai-nilai “humanistik” sebagai alternatif jalan dan penyeimbang saat dunia pendidikan berada dalam tarikan dua kutub, yaitu “pasar” dan “tradisi humanistik”. Implementasi humanisme pendidikan dalam proses pembelajaran di USD tercermin pada proses pembelajaran yang mengupayakan ketercapaian 3C, yaitu *competence*, *conscience* dan *compassion*. Secara lebih spesifik, proses pembelajaran yang mengakomodasi tinjauan atau perbuatan edukatif atas konteks, pengalaman, refleksi, tindakan, dan evaluasi mendorong pembelajar untuk menemukan dan mengembangkan kemanusiaannya dalam hubungan yang tak terpisahkan dengan perkembangan masyarakat. Aspek humanisme pendidikan dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan model-model pembelajaran kreatif dan inovatif memberi kesempatan mahasiswa dengan segala talenta dan kebebasan yang dimiliki untuk berinteraksi dengan sesamanya, serta bekerja sama dengan siapa pun yang mereka temui dalam proses pembelajaran itu sehingga mereka semakin bisa mengenal dan akrab dengan identitas

dan misi mereka sebagai pembelajar yang berkembang kemanusiannya dalam aneka peristiwa hidup yang dialami.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. 2006. *Filsafat Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Budiningsih, C. Asri. 2010. Strategi Pembelajaran Nilai yang Humanis. *Dinamika Pendidikan: Majalah Ilmu Pendidikan. FIP UNY, No. 02/TH.XII/Oktobre 2015. ISSN: 0853-151X hal. 1-13.*
- Callon, M. 1986. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In J. Law (Ed.), *Power, action and belief: A new sociology of knowledge?* (pp. 196-223). London: Routledge.
- Depdiknas. 2003. *Pendekatan Kontekstual*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Drost, J., SJ. 2001. *Ignatian Pedagogy, A Practical Approach, Ikhtisar*. Jakarta: Manuskrip.
- Irianto, Sulistyowati. 2012. *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Kratf, N. 2000. *Criteria for Authentic Project-Based Learning*. Denver: RMC Reseach Corporation.
- Law, J. 1992 . Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and heterogeneity. *Systems Practice*, 5 (4).
- Lie, Anita. 2005. *Cooperative Learning*. Jakarta: Grasindo.
- P3MP – USD. 2008. *Pedoman Model Pembelajaran Berbasis Pedagogi Ignatian*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Sastrapratedja, M. 2013. *Pendidikan sebagai Humanisasi*. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat Pancasila.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Jakarta.
- Universitas Sanata Dharma. 2013. *Rencana Strategis 2013-2017*.
- Utomo, Tjipto, and Ruijter, Kees..1994. *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Zahorik, John A. 1995. *Constructivist Teaching (Fastback 390)*. Bloomington, Indiana: Phi-Delta Kappa Educational Foundation.

# KELUAR DARI JERAT PENDIDIKAN YANG TAK MEMANUSIAKAN: Otonomi Pendidikan dan Rendahnya Kualitas Pembelajaran di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[indiatyr.blogspot.com](http://indiatyr.blogspot.com)

Internet Source

3%

2

[bidangkeilmuanfisika.blogspot.com](http://bidangkeilmuanfisika.blogspot.com)

Internet Source

2%

3

[bukuntukpapua.org](http://bukuntukpapua.org)

Internet Source

1%

4

[mfstudent.wordpress.com](http://mfstudent.wordpress.com)

Internet Source

1%

5

Submitted to Universitas Sanata Dharma

Student Paper

1%

6

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

7

Meijaard E., Sheil D., Nasi R., Augeri D. et al. "Hutan pasca pemanenan: melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006

Publication

<1%

8

Internet Source

<1 %

9

tammimsyafii.blogspot.com

Internet Source

<1 %

10

saintek.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On